

**M E M B A N G U N**  
**INDONESIA**

**YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN  
BERKEADILAN**

*Visi, Misi dan Program Aksi*

**Oleh:**

**Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**

**Prof. Dr. Boediono**

**Jakarta, 25 Mei 2009**

## DAFTAR ISI

|            |  |    |
|------------|--|----|
|            | Daftar Isi   | 1  |
| <b>BAB</b> | <b>PENDAHULUAN: VISI DAN PERSPEKTIF PEMBANGUNAN 5 TAHUN KEDEPAN</b>                            | 3  |
| <b>BAB</b> | <b>CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BANGSA KE DEPAN</b>                                       | 10 |
|            | 2.1 Capaian Selama Lima Tahun Terakhir di Bidang Ekonomi, Politik, Kesejahteraan, dan Keamanan | 10 |
|            | 2.2 Perspektif Masa Depan Indonesia Jangka Menengah dan Panjang                                | 20 |
| <b>BAB</b> | <b>MISI PEMBANGUNAN INDONESIA</b>  | 23 |
| <b>3</b>   | 3.1 Pendahuluan  | 23 |
|            | 3.2 Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera                                    | 25 |
|            | 3.3 Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi   | 27 |
|            | 3.4 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang  | 29 |
| <b>BAB</b> | <b>AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN</b>  | 32 |
| <b>4</b>   | 4.1 Lima Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009-2014   | 32 |
|            | 4.2 Agenda Pertama, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat   | 32 |
|            | 4.3 Agenda Kedua, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan   | 34 |
|            | 4.4 Agenda Ketiga, Penegakan Pilar Demokrasi   | 35 |
|            | 4.5 Agenda Keempat, Penegakan Hukum  | 36 |
|            | 4.6 Agenda Kelima, Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan                                   | 37 |
|            | 4.7 Sasaran Pembangunan 2009-2014  | 38 |
|            | 1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan   | 39 |
|            | 2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi   | 41 |
|            | 3. Sasaran Program Penegakan Hukum   | 41 |

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>BAB</b> | <b>PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN</b>                                | 42 |
| <b>5</b>   | <b>2009-2014</b>   |    |
| 5.1        | Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional                                     | 42 |
| 5.2        | Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional<br>2009-2014                 | 43 |
| 5.2.1.     | Program aksi bidang pendidikan   | 44 |
| 5.2.2.     | Program aksi bidang kesehatan  | 45 |
| 5.2.3.     | Program aksi penanggulangan kemiskinan                                       | 47 |
| 5.2.4.     | Program aksi Penciptaan Lapangan Kerja                                       | 49 |
| 5.2.5.     | Program aksi pembangunan infrastruktur<br>dasar                              | 51 |
| 5.2.6.     | Program aksi ketahanan pangan  | 53 |
| 5.2.7.     | Program aksi ketahanan dan kemandirian<br>energi                             | 55 |
| 5.2.8.     | Program aksi perbaikan dan pelaksanaan<br>tata kelola pemerintahan yang baik | 56 |
| 5.2.9.     | Program aksi penegakan pilar demokrasi                                       | 57 |
| 5.2.10.    | Program aksi penegakan hukum dan<br>pemberantasan korupsi                    | 57 |
| 5.2.11.    | Program aksi pembangunan yang inklusif<br>dan berkeadilan                    | 58 |
| 5.2.12.    | Program aksi pengembangan lingkungan   | 59 |
| 5.2.13.    | Program aksi pengembangan budaya   | 60 |
| <b>BAB</b> | <b>PENUTUP</b>   | 61 |
| <b>6</b>   |  |    |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita kita bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa kita yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita semua menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah mengajarkan kepada kita semua, bahwa kita telah berhasil melewati sejumlah cobaan, tantangan, dan hambatan. Kita tetap tegak berdiri, melangkah dengan pasti, dan berhasil melewati proses sejarah yang panjang dengan selamat.

Lebih dari satu dasawarsa, setelah bangsa kita didera oleh krisis multidimensi yang telah mengguncang fondasi bernegara, krisis yang memakan korban dan biaya yang sangat besar, krisis yang telah menjatuhkan rasa percaya diri dan wibawa kita sebagai sebuah bangsa yang terhormat dan bermartabat, kini kita telah mampu bangkit kembali. Kita telah mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia telah mampu membangun dirinya bahkan dengan lebih baik lagi, sehingga wibawa dan kehormatan kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, diakui dan dihormati kembali oleh dunia.

Kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah makin mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara maju. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization of Economic and Cooperation Development*) mengakui dan mengapresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bersama Cina, India, Brazil dan Afrika Selatan diundang masuk dalam kelompok *'enhanced engagement countries'* atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia juga tergabung dalam kelompok Group-20 atau G-20 yaitu, dua-puluh negara yang menguasai 85% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Dalam bidang politik, Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik yang mengubah negara kita dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis. Salah satu bagian penting dalam proses transformasi sistemik itu,

adalah terbangunnya tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa ---*good governance and clean government*. Kita berhasil bangkit dari sebuah negara, yang tata kelola pemerintahannya pernah dipandang sebelah mata, karena praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang meluas, menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

Sepuluh tahun yang lalu, kita merasa pesimis dan gamang terhadap pertanyaan; apakah Indonesia mampu melalui transisi dan menjalankan reformasi dengan konsisten dan berhasil? Pertanyaan yang relevan, karena pada saat itu ekonomi kita porak poranda, pertumbuhan mengalami kontraksi di atas 13%, nilai tukar Rupiah runtuh, inflasi mencapai 70%, hutang pemerintah melambung diatas 100% dari PDB, kemiskinan dan pengangguran melonjak tinggi. Seluruh kegiatan ekonomi praktis merosot dan terhenti. Kerusakan sosial dan konflik berdarah merebak. Tatanan politik berubah secara fundamental dengan pelaksanaan demokrasi, desentralisasi, dan amandemen konstitusi. Tatatan hidup masyarakat berubah secara drastis. Sebagian lembaga publik, menjadi *tidak* berfungsi. Tiba-tiba kita mengalami sebuah euforia reformasi dan kebebasan. Proses transisi yang tiba-tiba itu, begitu sulit dikelola karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang harus kita hadapi.

Lima tahun yang lalu, saya mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dengan kondisi negara kita yang belum sepenuhnya pulih dan tantangan global yang makin sulit seperti gejolak harga minyak, meroketnya harga pangan dan terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan resesi ekonomi dunia. Secara bertahap tapi pasti, kita menata dan membangun kembali Indonesia di segala bidang. Kita pulihkan ekonomi dengan mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan (*growth with equity*) dan bahkan memulihkan lingkungan alam yang rusak. Kita bangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dan bermartabat. Kita bangun kehidupan politik yang aman, damai, adil, beretika dan demokratis. Kita kembangkan kehidupan budaya dan jati diri bangsa yang kuat dan kreatif. Kita tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kita pulihkan dan pelihara kondisi yang aman dan damai di daerah-daerah konflik, utamanya di Aceh, Maluku, dan Papua. Untuk itulah, lima tahun lalu saya menyampaikan visi untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia yang sejahtera.

*Alhamdulillah*, dengan kerja keras kita semua, kita telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil, dan lebih demokratis. Indonesia tidak hanya sekedar pulih dari krisis, namun kita telah mampu membangun ketahanan nasional, prestasi serta reputasi yang baik di mata dunia.

Ke depan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang maju, namun tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus kita amankan, dan kita kelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, namun juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Tantangan lain yang muncul akhir-akhir ini adalah terjadinya perlemahan ekonomi global akibat krisis finansial yang diperkirakan akan terus berlangsung hingga dua tahun kedepan. Tugas kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, akan semakin sulit dengan terjadinya krisis ekonomi global. Kinerja ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi krisis keuangan global, meskipun kita telah dan terus berupaya untuk mengurangi dampaknya dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri.

Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Kita mampu mengubah krisis dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, kita memiliki berbagai sumber energi dari mulai minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geothermal dan air. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Dan penduduk Indonesia memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

Dengan perkiraan ekonomi dunia yang hanya akan mengalami pemulihan secara bertahap, serta tidak lagi terjadi gejolak (*shock*) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi nasional juga akan pulih secara bertahap. Dalam meniti ketidakpastian ini, fondasi

ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita dalam lima tahun kedepan akan dapat dijaga pada kisaran 6%-6,5%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat lebih tinggi, dan pada akhir periode lima tahun kedepan bukan tidak mungkin dapat mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, maka tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, akan tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses disini tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu, Karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa dijamin. Penguatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan perbaikan dan peningkatan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan bahkan subsidi yang proporsional, terukur dan tepat sasaran, sangat diperlukan.

Kita tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar dan globalisasi untuk secara otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan mekanisme pasar yang liberal tanpa batas, telah membuahkan krisis keuangan global yang dahsyat dan dapat menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, dan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional dan masyarakat kita semua.

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun itu semua belumlah cukup. Kita

harus mengakui bahwa sebagian kecil dari saudara-saudara kita masih hidup sedikit di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap gejolak harga, utamanya harga pangan. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus dihadapi secara lebih substantif dan mendasar.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat (*shared growth*) hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal bangsa yang kuat, kukuh dan berharga dalam menghadapi berbagai kondisi dan tantangan pada lingkup nasional, regional maupun global.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan dalam kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat terus menerus diuji melalui proses ini. Tujuannya, untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan. Kebebasan berpendapat harus makin dijamin, dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan.

Salah satu elemen penting di dalam demokrasi adalah aspek kesetaraan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat

konstitusi kita itu mewajibkan kepada negara untuk melindungi segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan jender. Sejarah perjalanan bangsa kita mengajarkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa diletakkan dalam kerangka monolitik. Demokrasi Indonesia adalah sebuah sejarah keberagaman. Karena itu demokrasi kita menjamin keberagaman ini. Bahkan keberagaman, yang telah dinyatakan dalam semboyan Bhineka Tunggal Eka, tersebut harus terus dijaga dan dijadikan modal dasar kultural yang membuat Indonesia menjadi khas dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Kita bersyukur, selama ini konsolidasi demokrasi telah kita laksanakan dengan baik, melalui proses pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Walaupun perbaikan terhadap iklim demokrasi telah kita lakukan, harus kita akui bahwa demokrasi yang ada---seperti banyak kritik yang diungkapkan---masih bersifat demokrasi prosedural dan belum sampai pada tingkat demokrasi yang substansial. Kita kerap berkebutut di dalam berbagai masalah prosedural. Ke depan, berbagai usaha harus kita lakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi substansial. Disini perlu dilakukan upaya penguatan pilar-pilar demokrasi yang dapat sepenuhnya menjamin proses *checks and balances* agar hak-hak rakyat dapat dijaga. Di dalam konstitusi kita, dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip pengawasan antarkekuasaan secara timbal balik dan berimbang. Konstitusi kita, juga secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, maka supremasi hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, mutlak harus diwujudkan.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan jauh kedepan yang masih harus kita hadapi, maka kerangka visi Indonesia 2014 ditekankan pada :

1. **Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung

tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

3. **Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Secara ringkas, kerangka visi Indonesia 2014 dapat dirumuskan dengan kalimat singkat, padat, jelas, dan visioner, yakni: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.**

Visi ini akan dicapai dengan menjalankan misi yang rumusannya dijabarkan pada bab 3. Rumusan misi tersebut dihasilkan dari analisis terhadap capaian selama ini dan tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa depan sebagaimana diuraikan pada bab 2 berikut ini.

## **BAB 2**

### **CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN**

#### **BANGSA KE DEPAN**

#### **2.1 Capaian Selama Lima Tahun Terakhir di Bidang Ekonomi, Kesejahteraan, Politik. dan Keamanan**

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah membuahkan hasil yang menggembirakan namun tetap menyisakan tugas ke depan. Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Antara lain, sebuah laporan resmi dari pemerintah AS bertajuk "*Global Trend 2025: A Transformed World*", yang dilansir bulan November tahun lalu, secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia bersama dengan Iran dan Turki akan menjadi pilar kekuatan ekonomi dunia setelah India, Cina, Brasil dan Russia pada tahun 2025.

Selama lima tahun terakhir telah banyak kemajuan yang telah dicapai. Upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, *alhamdulillah* telah membuahkan hasil. Di seluruh Indonesia, tidak ada gangguan keamanan yang berarti. Perdamaian di Nangroe Aceh Darusalam dan di beberapa daerah konflik lainnya seperti Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua telah menunjukkan kondisi keamanan yang semakin kondusif. Peningkatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, merupakan salah satu cermin dari perbaikan keamanan di tanah air. Begitu pula peningkatan investasi, baik investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri, merupakan cerminan dari tercapainya kondisi keamanan yang makin membaik ini.

Kemajuan yang berarti juga terlihat dalam agenda Indonesia yang adil dan demokratis. Proses transisi ke sistem demokrasi yang sebelumnya berjalan sedikit tersendat, kini telah berjalan lebih baik. Proses demokratisasi makin menguat dan diterima sebagai suatu keharusan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan terbuka. Reformasi konstitusi yang mewajibkan pemilihan langsung pada semua tingkatan pemerintahan, telah berhasil menciptakan akuntabilitas elektoral yang lebih luas.

Pemilihan umum telah berjalan secara jujur, adil, aman, dan lancar sebanyak tiga kali, setelah reformasi digulirkan tahun 1997/1998. Langkah besar ini dilanjutkan dengan pemilihan langsung

Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dan diikuti dengan pemilihan langsung kepala daerah. Jika pada tahun 2003 seluruh kepala daerah masih dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maka pada tahun 2007 hanya tersisa sepertiganya yang masih merupakan warisan sistem tidak langsung ini. Kini, seluruh kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air telah dipilih langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dalam sistem demokrasi di tanah air.

Kita juga menyaksikan tanda-tanda perbaikan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah. Para kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja dengan baik dalam masa pemerintahannya, mudah diduga dapat terpilih kembali. Beberapa kepala daerah kabupaten/kota dengan kinerja yang optimal, bahkan terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur. Pemerintah juga terus melanjutkan proses pembangunan kelembagaan yang melekat pada sistem demokrasi. Sistem *checks and balances* telah diperluas dan berbagai institusi independen telah dibentuk.

Dalam bidang penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, telah terjadi kemajuan yang pesat. Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi bagi pelaksanaan tugas pemerintah. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa pandang bulu. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Termasuk juga aparat penegak hukum. Kita bersyukur, sikap tegas Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan Negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi, harus didukung oleh kita semua, baik dengan menyusun perundangan-undangan yang baik dan kuat, maupun dengan pelaksanaan yang konsisten dan tanpa kompromi. Hanya dengan langkah ini, Indonesia dapat membangun martabatnya di mata dunia.

Keberhasilan kita dalam mengatasi tindak pidana korupsi menuai berbagai apresiasi dari sejumlah lembaga internasional. Laporan UNDP bertajuk *Report on Corruption for 2008* menyatakan bahwa untuk ketiga indeks persepsi korupsi, yaitu *Control Corruption Index (CCI)*, *International Country Risk Guide (ICRG) Corruption Score*, dan *Corruption Perception Index (CPI)*, kondisi di Indonesia dinyatakan telah menunjukkan banyak perbaikan. Untuk Indeks CCI, terjadi peningkatan dari -1,01 pada tahun 2000 menjadi -0,77 pada tahun 2006 untuk skala antara -2,50 – 2,50. Demikian pula indeks ICRG, nilai korupsi Indonesia untuk tahun 2006 berada pada skala 2,33, naik

dari 1,92 di tahun 2000 untuk skala 0-6, dengan skala 6 adalah nilai untuk potensi korupsi paling kecil. Sedangkan indeks CPI, Indonesia memperoleh nilai 2,30 pada tahun 2007, meningkat dari 1,70 di tahun 2000 untuk skala 1-10, dengan 10 adalah nilai untuk potensi korupsi paling kecil.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Langkah yang telah dan terus kita lakukan, mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Inilah esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam agenda peningkatan kesejahteraan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sangat besar selama periode 2004-2009 ini. Pada saat pemerintah yang saya pimpin baru berjalan 2 bulan, bencana alam Tsunami melanda Aceh dan kemudian kepulauan Nias. Tidak berhenti di situ, guncangan ekonomi global yang berlanjut dengan krisis energi dan pangan pada akhir tahun 2006-2007, tidak dapat kita hindari. Tekanan yang dahsyat, kita alami dengan krisis ekonomi global yang disebabkan oleh krisis finansial di Amerika Serikat sejak tahun 2008. Krisis ekonomi global ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Kita memasuki tahun 2009 dengan situasi ketidakpastian dalam perekonomian dunia. Banyak prediksi menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi global akan terus berlangsung hingga tahun-tahun mendatang ke seluruh dunia. Indonesia tergolong sebagai sedikit negara di dunia yang diyakini oleh banyak lembaga internasional akan mampu mengarungi krisis global ini dengan relatif baik. Artinya walaupun krisis terjadi, kita diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Kita akan mampu menjaga arah dan kecenderungan penurunan kemiskinan dan pengangguran, meskipun kecepatan perbaikan tentu dipengaruhi lingkungan global tersebut.

Pada awal masa pemerintahan, November 2004, kita menetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi yaitu *pro growth, pro jobs dan pro poor*. Dalam agenda *pro growth*, diharapkan terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja yang berdampak pada makin banyaknya keluarga Indonesia

dientaskan dari perangkap kemiskinan sekaligus mampu menghadapi berbagai guncangan, baik yang bersifat individual maupun global seperti krisis ekonomi.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa ketiga sasaran yang kita tetapkan telah tercapai. Dalam agenda *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 1997-1999, krisis ekonomi telah menyebabkan volume perekonomian menyusut rata-rata minus 2.9 persen per tahun. Sementara dalam periode 2000-2004, pada masa pemulihan ekonomi, perekonomian kembali tumbuh positif yaitu 4.5 persen. Sementara dalam periode 2005-2008, perekonomian tumbuh rata-rata 6%. Bahkan jika sektor migas kita keluarkan--- untuk menggambarkan gambaran denyut perekonomian dimana sebagian besar keluarga Indonesia beraktivitas---laju pertumbuhan sektor non migas sudah mendekati 7% per tahun yaitu 6,6% (2005-2008) dibandingkan 5,4 % dalam periode 2000-2004.

Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tercermin pula dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dalam USD. Berdasarkan data PDB terakhir dan nilai tukar rata-rata tahun 2008, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah mencapai USD 2.271 pada akhir 2008 naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004 sebesar USD 1.186. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan dengan ukuran apa pun yang digunakan. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung BPS, telah menurun menjadi 15,4% (atau 35 juta orang) pada Maret 2008, dibandingkan 16,7% (36,1 juta orang) pada tahun 2004.

Penurunan kemiskinan juga disebabkan oleh berjalannya program sosial pemerintah, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, program pendidikan dan kesehatan gratis dan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program-program pro rakyat seperti ini, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan disertai pula dengan distribusi pendapatan yang relatif tidak banyak berubah. Hal ini berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh negara-negara yang tumbuh tinggi seperti Cina, India atau Vietnam yang mengalami pemburukan distribusi pendapatannya. Keberhasilan menjaga distribusi pendapatan ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam melakukan realokasi anggaran pemerintah yang sebelumnya dinikmati langsung maupun tidak langsung---melalui subsidi energi---oleh kelompok masyarakat

berpenghasilan tinggi kepada kegiatan-kegiatan dimana partisipasi masyarakat yang berpenghasilan rendah tergolong tinggi seperti anggaran pendidikan dan kesehatan serta serangkaian program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dari program ini terhadap perbaikan distribusi pendapatan biasanya membutuhkan waktu cukup lama. Tetapi pengalaman kita dan banyak negara, *menunjukkan bahwa* perbaikan distribusi pendapatan hanya terjadi jika kebijakan dilakukan secara konsisten.

Perubahan yang lebih berarti kita lihat dalam agenda *pro jobs*. Dalam masa pemulihan ekonomi 2001-2004, penambahan jumlah angkatan kerja baru sekitar 1,7 juta setiap tahun sementara lapangan kerja yang mampu tercipta hanya 980 ribu per tahun, sehingga terjadi defisit lapangan kerja sekitar 700 ribu orang untuk setiap tahunnya. Tidak heran jika kemudian kita melihat tingkat pengangguran yang meningkat dalam periode tersebut. Tetapi dalam periode 2005-2008, kita berhasil membalikkan tren ini. Jumlah kesempatan kerja yang kita ciptakan rata-rata 2,2 juta per tahun, yang berarti di atas jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja yaitu 2 juta per tahun. Dampaknya sangat menggembirakan, jumlah penganggur secara nominal berhasil kita turunkan dan tingkat pengangguran berangsur turun menjadi 8,5% pada tahun 2008 dan diperkirakan akan menurun lagi menjadi 8,1% pada awal tahun 2009.

Kemajuan yang berarti juga terjadi dalam bidang produksi pangan. Produksi semua komoditas pangan meningkat tajam, khususnya dalam dua tahun terakhir. Produksi beras tahun 2008 sebesar 59,9 juta ton adalah tertinggi dalam sejarah. Peningkatan produksi ini telah memungkinkan bukan hanya menolong bangsa Indonesia menghadapi krisis pangan, tetapi juga meringankan beban bangsa lain dalam mengatasi krisis pasokan beras di pasar global. Hal ini disebabkan karena Indonesia sebelumnya merupakan salah satu importir beras dunia. Pengalaman masa lalu menunjukkan, setiap Indonesia memutuskan untuk mengimpor beras, maka harga beras dunia akan meningkat USD 20-50/ton.

Keberhasilan kita dalam meningkatkan produksi beras, sekaligus mengendalikan harganya, telah menjadikan kita mampu mengatasi krisis pangan. Keberhasilan kita dalam mengatasi krisis pangan, telah menuai apresiasi dari bangsa-bangsa lain di dunia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan yang diadakan di Roma, bulan Juni 2008, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memuji keberhasilan kita dalam mengatasi persoalan pangan. FAO bahkan menyatakan bahwa

keberhasilan kita layak dijadikan model bagi bangsa-bangsa lain dalam mengatasi krisis pangan global. Tentu saja, keberhasilan kita dalam peningkatan produksi beras ini harus terus dilanjutkan. Insya Allah, pada tahun ini jika produksi musim panen 2009 berhasil dengan baik, kita akan mengubah status dari importir beras menjadi eksportir beras.

Trend peningkatan produksi pangan juga terjadi dalam komoditas lain seperti gula, kedele dan jagung. Keberhasilan peningkatan pangan melalui peningkatan produksi akan menguntungkan produsen dan konsumen. Produsen akan mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara konsumen menikmatinya melalui stabilitas harga. Mengingat lebih dari separuh keluarga miskin menggantungkan sumber penghasilannya dari kegiatan pertanian dan pedesaan, manfaat perbaikan produksi di bidang pangan ini akan lebih banyak dinikmati oleh mereka. Diharapkan, kondisi yang baik ini pada gilirannya akan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan seperti yang pernah kita alami pada periode 1970an dan 1980an.

Dalam bidang pendidikan, peningkatan anggaran secara dramatis telah dilakukan. Jika pada tahun 2005 anggaran pendidikan hanya Rp 78,5 trilyun, maka sesuai dengan amanat konstitusi anggaran pendidikan telah berhasil ditingkatkan dua kali lipat, menjadi Rp 154,2 trilyun pada 2008. Pada tahun 2009, *alhamdulillah* kita berhasil memenuhi amanat konstitusi dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi Rp 207,4 trilyun atau 20 % dari APBN. Peningkatan anggaran pendidikan dapat memperbaiki akses bidang pendidikan dan kualitas pendidikan.

Kemajuan juga terlihat dari peningkatan angka tingkat partisipasi kasar tingkat SMP/MTSN dan SMA/SMK/MA yang meningkat dari 84,02 persen dan 53,86 persen (2005) menjadi 84,30 persen dan 54,60 persen (2007). Peningkatan angka tingkat partisipasi kasar ini, berkat dari berjalannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005. Program ini memungkinkan biaya sekolah yang harus dibayar oleh keluarga Indonesia secara efektif dapat ditekan hingga tingkat yang minimum dan dengan suplemen dari APBD, makin banyak daerah yang mampu membebaskan biaya pendidikannya. Dari sisi permintaan, pemerintah telah merintis skema insentif baru untuk mendorong keluarga miskin mengirimkan anaknya ke sekolah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Kombinasi program BOS yang bersifat universal dari sisi penawaran dan program PKH yang terbatas,

diharapkan bukan hanya mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi tetapi juga memperkuat daya saing bangsa dalam persaingan global yang makin ketat.

Kita juga menyadari, bahwa keberhasilan program pendidikan sangat tergantung pada pasokan dan kualitas guru dan dosen. Ekspansi anggaran bidang pendidikan di samping digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam merehabilitasi gedung sekolah – yang dibangun tahun 1970an dan 1980an – serta penambahan kelas dan gedung sekolah, digunakan *pula* untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah menempuh dua jalur dalam hal ini. Pertama, menjamin penghasilan *take home pay* guru dan dosen minimal Rp 2 juta/bulan dan Rp 13 juta untuk guru besar dengan memberikan tunjangan kemaslahatan guru dan dosen mulai tahun 2009 ini. Kedua, untuk mendorong peningkatan kualitas pengajar, bagi guru dan dosen yang bersertifikat akan mendapatkan tambahan penghasilan tambahan. Program ini telah dimulai sejak tahun 2008 dan berlaku untuk sekolah negeri dan swasta.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan juga dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah dan universitas berkualitas internasional. Di samping itu, pemerintah telah secara bertahap meningkatkan kualitas menjadi bertaraf internasional dengan melakukan komputerisasi dan peningkatan penguasaan bahasa asing yang disertai dengan akses internasional pada sekolah negeri, dimulai pada tingkat SMA.

Selain dalam bidang pendidikan, kita juga terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Jika pada tahun 2005 anggaran kesehatan hanya mencapai Rp 5,8 trilyun maka pada tahun 2008 kita tingkatkan, tiga kali lipat, menjadi sekitar Rp 16 trilyun. Sebagian besar tambahan anggaran kesehatan itu digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, atau melalui Jamkesmas. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun 2008 lalu berhasil melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, Pemerintah juga telah menurunkan harga obat generik secara substansial dan terus menerus dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sebagian lagi dari anggaran kesehatan yang terus meningkat itu, digunakan untuk merekrut tenaga dokter dan paramedis baru serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi puskesmas dan membangun rumah sakit baru di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sebagian dana kesehatan juga telah digunakan

untuk program Revitalisasi Keluarga Berencana yang sempat terlantar pada awal reformasi dan desentralisasi. Ekspansi sektor kesehatan, sebagian telah memberikan hasil yang nyata seperti penurunan tingkat prevalensi anak gizi buruk.

Kita menyadari bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil jika sekedar mengandalkan laju pertumbuhan ekonomi. Berbagai program intervensi, terus kita lakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah ini merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat. Langkah ini ditempuh dengan berbagai cara.

**Pertama**, menetapkan subsidi untuk bantuan sosial yang sangat besar di tahun 2009 yang mencapai Rp. 79 trilyun. Alokasi dari subsidi bantuan sosial itu, antara lain disalurkan dalam bentuk program proteksi keluarga miskin seperti Bantuan Langsung Tunai, Program Beras untuk keluarga miskin, dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dapat dikatakan sebagai program memberi ikan. Di samping itu pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk program yang dikatakan memberikan kail. Program ini antara lain berupa Bantuan Langsung Masyarakat sebagai bagian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Kedua**, di samping meningkatkan anggaran, pemerintah juga telah melakukan upaya untuk pengarusutamaan (*mainstreaming*) program kemiskinan dalam PNPM. Upaya ini diharapkan dapat mengharmonisasikan berbagai program anti kemiskinan yang tersebar di berbagai pos anggaran kementerian dan lembaga menuju sasaran yang sama, sekaligus menghilangkan duplikasi program.

**Ketiga**, sesungguhnya dana yang dikucurkan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan hanya salah satu elemen dari program penanggulangan kemiskinan. Di pihak lain, keluarga miskin memerlukan iklim berusaha yang kondusif untuk mengangkat dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Berbagai pungutan yang muncul akibat eforia reformasi dan desentralisasi, telah banyak membebani usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk memperbaiki iklim berusaha ini. Salah satunya adalah dengan melakukan amandemen UU Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mendisiplinkan pemerintah daerah

dalam menetapkan pungutan baru dengan tidak menghilangkan semangat desentralisasi fiskal. Langkah lainnya, ditempuh dengan menerbitkan Inpres No 6 /2007 dan Inpres 5 /2008 yang memuat program aksi yang kongkrit dalam memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM.

Semua capaian itu adalah bukti bahwa bangsa Indonesia tetap bisa berkarya dan mampu berkiprah serta bersaing di pasar global yang makin kompetitif. Padahal berbagai goncangan seperti bencana alam –Tsunami di Aceh dan Nias serta bencana alam lainnya disusul dengan krisis energi dan krisis pangan dan resesi perekonomian global secara terus menerus terjadi. Keberhasilan ini, juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bisa dan mempunyai daya tahan yang kuat. Hal ini telah mendapatkan pengakuan internasional. Tahun 2008 lalu--- suatu komisi untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang beranggotakan sekumpulan orang bijak (*prominent persons*) dari seluruh dunia dan beranggotakan beberapa pemegang Nobel di bidang Ekonomi--- mengumumkan hasil laporan studi mereka yang menunjukkan Indonesia adalah salah satu dari 13 negara di dunia yang mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi selama lebih dari tiga dekade. Laporan ini juga menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang mampu mempercepat laju pertumbuhannya kembali ke tingkat 7 persen per tahun dalam beberapa tahun mendatang dan memungkinkan kita mengejar negara maju lainnya. Namun sejumlah tantangan sudah di depan mata. Krisis ekonomi global yang melanda dunia, perlu dihadapi bersama. Belum lagi tantangan yang lebih besar dalam jangka menengah yang perlu kita persiapkan dengan lebih baik.

Dalam menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi global, hingga saat ini kita relatif lebih siap dibanding banyak negara lain. Sektor keuangan – yang menjadi jantung perekonomian – jauh lebih sehat dibandingkan keadaan sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Kredit bermasalah hingga dewasa ini, hanya 5 persen jauh di bawah 35% pada saat menjelang krisis 1997/1998. Fungsi supervisi perbankan dan sektor keuangan, kini lebih baik. Resiko ekonomi makro kita pun berada dalam tren menurun, baik dilihat dari rasio utang pemerintah maupun utang luar negeri. Keberhasilan menghadapi krisis ekonomi global ini menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih terhormat. Jika di masa lalu, Indonesia selalu dinasehati dalam kebijakan mengatasi krisis, kini banyak pemimpin dunia yang minta nasehat dari Indonesia dan belajar dari Indonesia tentang cara mengatasi krisis.

Kemajuan-kemajuan yang dikemukakan tersebut di atas, dapat kita capai dengan kebersamaan dan kerja keras di antara pemerintah, dunia usaha, dan segenap rakyat Indonesia. Salah satu kebersamaan dan kerja keras di antara pemerintah, dunia usaha, dan rakyat Indonesia adalah dalam peningkatan kesadaran pengelolaan dan pembayaran pajak. Sumber pembangunan kini lebih banyak mengandalkan penerimaan pajak dan pembiayaan dari pasar domestik. Konsolidasi fiskal yang dilakukan di masa lalu, telah membuahkan hasil yang memadai, bukan hanya untuk memperkuat keberlangsungan fiskal tetapi juga ketersediaan *fiscal space* yang memadai untuk mendorong perekonomian domestik. Inti dari konsolidasi fiskal terletak dari perbaikan struktur penerimaan negara, peningkatan efektifitas pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah, serta terkendalinya risiko fiskal terutama menyangkut sisi pembiayaan defisit anggaran.

Struktur penerimaan makin sehat dengan meningkatnya peran penerimaan non migas, khususnya pajak penghasilan. Jumlah penduduk yang memiliki NPWP telah melebihi 10 juta pada tahun 2008. Peningkatan jumlah wajib pajak di samping meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga mengurangi risiko dalam penerimaan. Rasio pajak terhadap PDB meningkat dari 12,5 % pada tahun 2005 menjadi 14,1 % pada tahun 2008. Peningkatan penerimaan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sehingga telah menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dari sisi pengeluaran, efektifitas pengeluaran pemerintah makin mendekati tingkat optimal. Memang masih ada pengeluaran yang tidak bisa direalisasikan. Namun sebagian disebabkan oleh sistem pengadaan yang makin baik dengan dilakukan *e-procurement* yang menghemat pengeluaran hingga 15%. Pengeluaran untuk kebutuhan yang esensial bagi pembangunan, terus meningkat termasuk untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Konsolidasi ini berujung pada perbaikan risiko ekonomi makro Indonesia. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terus menurun dari 56,4 persen pada tahun 2004 menjadi 32,7 persen pada tahun 2008. Penurunan rasio ini diikuti pula dengan dengan penurunan jumlah stok utang luar negeri. Pembiayaan defisit anggaran, kini lebih mengandalkan pada sumber domestik. Penurunan rasio utang ini, juga lebih baik dibandingkan dengan trend yang berlaku di negara Asia lainnya. Dengan demikian, diharapkan proses konsolidasi fiskal ini bisa

menjadi motor untuk mempercepat perbaikan peringkat *investment grade* Indonesia dalam 2 tahun mendatang.

Pengalaman dalam menghadapi krisis lalu termasuk krisis energi dan pangan akan menjadi modal penting dalam menghadapi tahun-tahun mendatang.

## 2.2 Perspektif Masa Depan Indonesia Jangka Menengah dan Panjang

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014), tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat.

**Pertama**, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008, belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Akan banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi, jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi kandungan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Jumlah tenaga kerja yang tercipta per 1 persen pertumbuhan ekonomi di masa kini, lebih kecil dibandingkan periode 10 tahun lalu. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

**Kedua**, percepatan pembangunan ekonomi juga dibutuhkan bukan hanya mengurangi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan tetapi juga memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Agenda pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan berbagai intervensi yang efektif.

**Ketiga**, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas memerlukan waktu, dalam kurun waktu tertentu program afirmatif masih dimungkinkan

sepanjang sarannya jelas dan terarah. Kesenjangan memiliki banyak dimensi, selain pendapatan juga sumber daya alam dan manusia, infrastruktur dan yang lainnya, demikian juga keterkaitannya dengan bermacam-macam dikotomi seperti dikotomi jender, kota-desa, Jawa-Luar Jawa atau antar daerah. Masalah kesenjangan dalam berbagai dimensi masih merupakan agenda penting dalam pembangunan.

**Keempat,** pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan menyebabkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007/2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai asosiasi kuat dengan kerusakan lingkungan hidup. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, maka krisis pangan pun dapat kembali setiap saat.

**Kelima,** pembangunan infrastruktur makin penting dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki asosiasi yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur. Walaupun pemerintah telah meningkatkan pengeluaran dalam bidang infrastruktur, kesenjangan infrastruktur masih terasa baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

**Keenam,** sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, jender atau antar daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

***Ketujuh,*** keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Bukan rahasia lagi, kualitas birokrasi Indonesia jauh dari memadai khususnya untuk mengendalikan persaingan bangsa di pasar global. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global.

***Kedelapan,*** kita telah memutuskan demokrasi sebagai dasar kita berbangsa. Pasangan yang kompatibel dengan demokrasi adalah desentralisasi. Kita telah menjalankan desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi merupakan agenda penting lainnya untuk memungkinkan kita mengambil manfaat yang optimal untuk memperkuat integritas dengan ekonomi global. Dewasa ini kita telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaan demokrasi. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu kita jalankan sepenuhnya.

***Kesembilan,*** dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Banyak agenda perbaikan sistem hukum yang sudah kita benahi. Tetapi secara jujur harus diakui, fungsi hukum sebagai penuntun kita berkehidupan sehari-hari masih jauh dari harapan.

## BAB 3

### MISI PEMBANGUNAN INDONESIA

#### 3.1 Pendahuluan

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil yang prestisius pada periode 2004-2009, tentu harus terus kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di periode 2004-2009 itu, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar ---*main capital*--- yang harus kita lanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang (2009-2014). Pada periode 2009-2014 kita harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.

Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17/2007. Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah terwujudnya Indonesia yang **Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur**. Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan misi dan sasaran .

Misi Pembangunan Indonesia 2009-2014 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008 hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia. Seluruh ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009, yang disebabkan rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riil dan perdagangan dunia. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDG) juga akan terhambat.

Meski pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi krisis global, antara lain, yang telah dilakukan oleh forum

G-20, namun pemulihan ekonomi global masih akan memerlukan proses yang cukup panjang. Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan termasuk menyelesaikan *toxic asset* (yang merusak neraca keuangan bank) dan rekapitalisasinya, memperbaiki regulasi dan pengawasan sektor keuangan, melakukan program *counter cyclical* melalui stimulus fiskal, dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antara negara membutuhkan koordinasi yang rumit antar negara, selain juga melalui proses politik di masing-masing negara yang tidak mudah.

Sementara itu munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (*climate change*) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama, meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim, adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri.

Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2009-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (*climate change*) tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%-6,5% pada periode 2009-2014, dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, dimana stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam.

Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat dan sumber daya manusia yang besar yang menerima pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang bermutu dan berkesinambungan untuk menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia – yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Kita juga telah menjalankan proses desentralisasi sistem pemerintahan yang dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya, diperlukan pemerintahan yang cakap (*capable*), amanah (*trusted*) dan tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintahan yang demikian memerlukan pemimpin yang mampu memberikan contoh nyata dalam bentuk kehidupan yang bersih, taat hukum dan konstitusi, memiliki rasa empati kepada rakyat dan keteladanan dalam kehidupan. Pemimpin yang secara tekun dan konsisten terus membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten dan sungguh-sungguh.

Misi pembangunan 2009-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2009-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010 sebagai berikut.

### **3.2 Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera**

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan

pangan yang terjadi pada periode 2005-2008 dimana harga-harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dan dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah menyebabkan banyak rakyat kita merasa terancam kesejahteraannya karena meningkatnya harga pangan dan energi, meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan didalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutanan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan.

Krisis keuangan global yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, terjadinya gejolak harga pangan dan energi di seluruh dunia, serta makin pentingnya issue perubahan iklim global dalam beberapa tahun ini, akan menyebabkan tuntutan dan reaksi akan perubahan dasar dalam tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi global yang baru harus mengedepankan aspek kemakmuran masyarakat dunia secara bersama, merata, adil dan berkelanjutan. Untuk itu model pembangunan ekonomi yang tidak memberikan ruang dan peran yang penting serta proporsional bagi munculnya negara-negara berkembang (*emerging countries*) tidak dapat terus dipertahankan. Koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas, tanpa disertai regulasi dan pengawasan yang cukup, untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas, harus dilakukan. **Pasar harus dilindungi dari tindakan dan keputusan pelaku pasar yang sembrono dan tamak yang hanya didasarkan perhitungan keuntungan bisnis dan pribadi dalam jangka pendek, dengan mengesampingkan azas kehati-hatian, kepatutan, dan keberlanjutan.**

Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mengantisipasi dan harus tercermin dalam penetapan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia, serta dalam menetapkan langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal ini untuk

menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita-cita kemandirian dan kemajuan dalam kemakmuran rakyatnya. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi dan transisi demokrasi yang sangat rumit dalam satu dasawarsa ini, serta kesiapan yang terus ditingkatkan dalam mengelola dampak krisis keuangan global saat ini, akan menjamin terpeliharanya momentum perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini juga menandai bangkitnya Indonesia kembali dalam kancah internasional dengan kewibawaan dan respek dunia yang muncul karena kebangkitan Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal yang mulia yaitu azas tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penghormatan kepada Hak Azasi Manusia, pluralisme, demokrasi, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, serta berpartisipasi dalam tanggung jawab memelihara keseimbangan lingkungan alam dan keamanan dunia.

Di dalam negeri, tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia (*decent jobs*). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Misalnya pembangunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi disamping merefleksikan kemajuan, memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula.

### **3.3. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi**

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini, menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun dalam proses pematangan demokrasi itu, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara

kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota, telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Sampai tahun 2008, seluruh kepala daerah di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, terus kita bangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan, serta sikap kritis berbagai pihak terhadap Pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama kita junjung tinggi, sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat kita jaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum perlu terus kita bangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media

dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

### **3.4 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang**

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan,

keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan, diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Karena itulah, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yang telah berjalan selama ini, perlu terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus kita dorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita harus terus melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah kita bangun di periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus kita tingkatkan. Capaian pembangunan di tahun 2004-2009 yang berhasil mencapai peningkatan peran kaum perempuan sebesar 125 persen di banding sebelumnya, harus kita tingkatkan. Tentu saja, kita juga harus terus memperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

## **BAB 4**

### **AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1. Lima Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009-2014**

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Agenda ketiga, penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda keempat, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda kelima, pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan

#### **4.2 Agenda Pertama, Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin dari peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program aksi untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Program Pemerintah 2004-2009 telah meletakkan fondasi dalam bidang perbaikan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai seperti penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya sasaran dalam *Millineum Development Goals*. Fondasi kebijakan perbaikan kesejahteraan rakyat juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan baik, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Pemerintahan 2009-2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan. Pengarusutamaan ini tidak hanya terbatas antar sektor tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengarusutamaan harus juga mencakup kebijakan agar tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang minimal.

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*). Dengan cara itu, maka akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain, ekonomi kreatif ---*creative economy*---, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukana melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan dengan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.

### 4.3. Agenda Kedua, Perbaikan Tatakelola Pemerintahan

Perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tatakelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Karenanya, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tatakelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Di sisi lain, Indeks persepsi korupsi terus membaik secara signifikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras pemerintah dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian Capaian selama periode sebelumnya masih belum memadai. Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah periode 2004-2009 telah mulai melakukan *pilot project* di enam kementerian dan lembaga yang penting untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja. Elemen reformasi di enam kementerian dan lembaga itu menjadi sangat luas dan intensif, termasuk perubahan sistem renumerasi. *Pilot project* ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan korupsi.

Langkah-langkah yang disebutkan di atas, akan dipercepat dengan menggelindingkan lebih banyak program percepatan aksi reformasi sistem birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum.

Cakupan perbaikan dalam tatakelola pemerintahan bukan hanya terbatas pada sektor pemerintahan tetapi juga meliputi sektor swasta termasuk pengelolaan BUMN. Untuk mendorong perbaikan tatakelola swasta, pemerintah mendatang akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Perubahan ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik dari sektor korporasi di Indonesia. Hal ini juga penting untuk

mencegah kolusi, nepotisme serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

#### **4.4. Agenda Ketiga, Penegakan Pilar Demokrasi**

Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2009-2014.

Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balances*, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan maupun jender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah kita lakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses *checks and balances*. Kita terus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supermasi hukum. Kita juga terus menjaga demokrasi kita agar berada pada arah yang benar. Demokrasi yang egaliter.

Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi kita telah berhasil melakukan pemilihan umum baik ditingkat nasional maupun lokal. Walau perbaikan telah kita lakukan, kita harus mengakui bahwa demokrasi yang kita bangun --seperti banyak kritik yang diungkapkan-- masih bersifat demokrasi prosedural dan belum sampai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum kita bisa beranjak kepada demokrasi substansial kita harus bisa menyelesaikan semua masalah prosedural. Didalam proses pemilihan umum misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan baik didalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, baru setelah itu kita melangkah menuju demokrasi substansial

#### 4.5. Agenda Keempat, Penegakan Hukum

Sistem yang demokratis juga harus disertai dengan tegaknya "*rule of law*". Karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2009-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa keadilan dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia

Agenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu kita di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang amat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini, kita telah dan terus melakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kita tidak ingin terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundangan. Kita tidak ingin terhambatnya pelaksanaan implementasi peraturan perundangan. Kita juga terus mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam usaha pemberantasan korupsi, kita telah menindak lanjuti berbagai kasus tanpa pandang bulu. Proses penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Untuk masalah yang terkait dengan struktur hukum, kita upayakan dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara, benar-benar menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti. Dengan demikian makin tegak dan pasti hukum di negeri kita.

#### **4.6. Agenda Kelima, Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan**

Perbaikan keadilan masih akan menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan 2009-2014 mengingat pelaksanaan agenda keadilan di masa lalu, belum mampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain di masa lalu, proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode.

Perwujudan keadilan bisa diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara desa dan kota, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat dan sebagainya. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, pemerataan antar jender dalam politik, dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Upaya pengurangan kesenjangan pendapatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam periode 2004-2009 dengan berbagai kebijakan. Misalnya, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk program anti kemiskinan dengan melakukan realokasi subsidi yang diterima oleh kelompok yang berpenghasilan atas. Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan, kesehatan dan PNPM Mandiri pada periode 2005-2008 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Proses perencanaan yang bersifat *bottom up* dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankan sekaligus mendapatkan manfaat dari program-program tersebut.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program aksi. Misalnya dalam program pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah akan diberikan insentif tambahan berupa bantuan tunai bersyarat. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka

panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam sasaran dari semua program pemerintah agar benar-benar menyentuh kelompok yang berpenghasilan rendah.

Program lain yang akan dilanjutkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan adalah program aksi perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 akan meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat mikro. Diharapkan, proses perencanaan *bottom-up* akan menjalar pada tingkat kabupaten dan propinsi dan seterusnya pada periode berikutnya.

#### **4.7. Sasaran Pembangunan 2009-2014**

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi pun, akan bertambah banyak, sementara kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah harus realistis dan harus menghindari diri dari membuat janji-janji yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Pengalaman pemerintah selama periode 2004-2009 menjadi modal utama dalam menyusun agenda dan strategi pembangunan ini. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Disadari sejak awal, banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian tersebut. Faktor eksogen, bisa mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya, kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan pengekspor energi neto. Sebaliknya bencana alam seperti gelombang panas Elnino seperti yang terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Tidak ada yang akan mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut. Walaupun demikian, beberapa perubahan eksogen ini dapat dikendalikan. Sebagian dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan

yang tepat. Upaya keras dan langkah antisipasi yang tepat akan menjadi tekad pemerintah yang akan datang untuk mencapai sasaran yang disebutkan di bawah ini.

## **1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan**

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Diharapkan dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2009-2014 ini.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan bijaksana, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 3-5 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain di tandai oleh; (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan; dan (c) Berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa; (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; (e) menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran; dan (f) meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan *comparative advantage* dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Di bidang energi, membangun ketahanan energi dengan mencapai; (a) diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda; (b) Meningkatkan penggunaan *renewable energy* dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; (c) Meningkatkan efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan (d) *Memproduksi* energi yang bersih dan ekonomis.

Di bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam di perkotaan dan pedesaan. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Dalam bidang infrastruktur, meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

## **2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi**

Penegakan pilar demokrasi memiliki sasaran agar dapat terbangun dan makin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik. Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun justru akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga untuk menjamin setiap lima tahun terselenggara proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab.

## **3. Sasaran Program Penegakan Hukum.**

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas, dan juga mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dengan demikian reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan diatas, pemerintah juga tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian maka dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia akan memasuki periode kesejahteraan yang membanggakan kita semua.

## **BAB 5**

### **PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN 2009-2014**

#### **5.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional**

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Setelah berhasil menyelesaikan program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009) dengan capaian-capaian yang

prestisius, maka pemerintah mendatang akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel.

Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS yang selama ini dilakukan dengan partisipasi yang minimal dari pemerintah daerah, padahal UU Otonomi Daerah telah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tugas dari pemerintah kabupaten/kota, perlu melibatkan lebih aktif peran serta dari pemerintah daerah.

## **5.2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2009-2014**

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi di bawah ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 13 program aksi sebagai berikut: (1) Program aksi bidang pendidikan; (2) Program aksi bidang kesehatan; (3) Program aksi penanggulangan kemiskinan; (4) Program aksi Penciptaan Lapangan Kerja; (5) Program aksi pembangunan infrastruktur dasar; (6) Program aksi ketahanan pangan; (7) Program aksi ketahanan dan kemandirian energi; (8) Program aksi perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik; (9) Program aksi penegakan pilar demokrasi; (10) Program aksi penegakan hukum; (11) Program aksi pembangunan

yang inklusif dan berkeadilan; (12) Program aksi bidang lingkungan hidup; (13) Program aksi pengembangan kebudayaan

### **5.2.1. Prioritas 1: Program Aksi Bidang Pendidikan**

Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Sejarah keberhasilan negara-negara di dunia selalu ditopang dan bertumpu pada kualitas manusia yang berpendidikan, berketrampilan, memiliki karakter dan kepribadian yang kuat, pekerja keras, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, produktivitas, kreativitas, dan kebebasan ide. Pengalaman sejarah menunjukkan pula peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan pendidikan di kalangan masyarakat mempunyai asosiasi positif dengan upaya untuk mempercepat penguatan pilar-pilar demokrasi. Karena itulah, pembangunan dalam pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencapai ketiga misi pembangunan sekaligus

Fokus Program aksi Pendidikan adalah :

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Pendidikan gratis atau terjangkau ini tidak hanya dilakukan dengan sekedar membebaskan murid dari SPP tetapi juga dari pungutan lain seperti buku wajib atau kegiatan praktek ekstra kurikulum.
3. Perbaiki secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.

4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
5. Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
6. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
8. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

### **5.2.2. Prioritas 2: Program Aksi Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah perilaku manusia Indonesia terutama pada kelompok menengah ke bawah, mengingat peran tenaga kerja sebagai faktor produksi utama yang dimilikinya. Mereka akan lebih berani mengambil resiko dalam pengambilan keputusan karena perasaan ketidakamanan (*insecurity*) yang menjadi kendala bagi mereka menjadi lebih longgar. Intervensi pemerintah dalam bidang kesehatan sangat penting dan menentukan, mengingat analisis pencapaian dari MDGs pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tujuan-tujuan dalam bidang tersebut hanya dapat dicapai jika intervensi dilakukan lebih intensif dan efektif.

Oleh karena itu, fokus utama program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.
2. Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir.
3. Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengolahan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta. Upaya ini diharapkan akan mengembangkan program wisata medik dan sekaligus mengurangi devisa yang dikeluarkan keluarga menengah ke atas Indonesia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
4. Upaya untuk meningkatkan kapasitas generasi mendatang sudah harus dimulai sejak bayi dalam kandungan. Oleh karena itu fokus lain dalam bidang kesehatan adalah pada meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, semua anak Indonesia sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDGs.
5. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
6. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%. Diharapkan melalui perbaikan gizi balita, rantai kemiskinan antar generasi dapat diputuskan. Untuk mencapai sasaran tersebut di samping memperkuat institusi yang ada seperti Puskesmas dan Posyandu, pemerintah mendatang akan memberikan insentif tambahan berupa bantuan tunai bersyarat (sebagai bagian dari PKH) kepada rumah tangga miskin jika

memeriksa kesehatan ibu dan balitanya di Puskesmas atau Posyandu dan mencapai target kesehatan fisik tertentu.

7. Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga.
8. Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai. Dalam tahun-tahun mendatang sistem insentif yang ada akan disempurnakan dengan tanpa mengurangi makna dari desentralisasi atau otonomi daerah.
9. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam rancang bangun alat-alat kesehatan (alkes)
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban
12. Evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam

### **5.2.3. Prioritas 3: Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah, perlu terus dilakukan dengan mengingat beberapa hal.

**Pertama,** persentasi keluarga sangat miskin yang berada di bawah \$ 1 kini sudah di bawah 5 %. Masalah dari kelompok ini seperti kapasitas sumber daya manusia atau aset fisik yang tidak memadai, lokasi yang terisolasi, umur dan sebagainya. Heterogenitas masalah ini menyebabkan program anti kemiskinan masal dan *top-down* menjadi kurang efektif.

**Kedua,** masih dominannya kelompok penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan dan tergolong rentan terhadap guncangan. Implikasinya, program penanggulangan kemiskinan yang baru, bukan hanya sekedar memberikan dan memperluas kesempatan (*opportunities*) tetapi juga memberikan peluang untuk peningkatan kapasitas baik aset maupun sumber daya manusia bagi kelompok *near poor* ini.

**Ketiga,** jebakan kemiskinan dengan sangat terpaksa memaksa banyak keluarga miskin merusak lingkungan hidup untuk mempertahankan hidupnya. Intervensi yang efektif bukan hanya akan mampu menentaskan kemiskinan tetapi juga mempertahankan lingkungan hidup.

**Keempat,** dana program kemiskinan yang telah dialokasikan terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara di pihak lain dampak penurunan kemiskinan masih belum sebanding dengan penambahan dana. Ini berarti tatakelola program kemiskinan perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan penggunaan dana.

Dengan demikian, maka program aksi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut:

1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai inti dari program kemiskinan yang sudah dimulai sejak 2007 dengan mengekspansi jumlah kecamatan yang tercakup dalam PNPM dan alokasi dana per kecamatan yang terus ditingkatkan sesuai dengan kinerjanya. PNPM bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* pada tingkat akar rumput sehingga sangat mudah ditingkatkan pada tingkat kabupaten dan propinsi.

2. Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung). Upaya pengarusutamaan ini akan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah sehingga diharapkan di masa mendatang tidak terjadi duplikasi program dan sekaligus memperbaiki efektifitas program.
3. Keadaan ekonomi dunia yang masih dalam suasana ketidakpastian ini, menyebabkan krisis ekonomi masih sangat mungkin terjadi. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini efektif dalam mengatasi gejolak yang temporer akan selalu disiagakan untuk dipergunakan setiap waktu. Program ini akan disempurnakan dengan selalu memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi atau kebocoran dapat dihindari.
4. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan. Untuk memotong rantai kemiskinan antar generasi, pemerintah mendatang akan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan serta perbaikan gizi balita.
5. Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif, antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin
6. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

#### **5.2.4. Prioritas 4: Program Aksi Penciptaan Lapangan Kerja**

Terdapat empat masalah utama dalam pasar kerja Indonesia yang belum dapat ditangani sepenuhnya dalam periode 2004-2009, yaitu: (i) persentase sektor informal yang relatif tinggi walaupun sudah menunjukkan penurunan; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal-informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda.

Oleh karena itu, disamping upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 5-6% pada akhir tahun 2014, maka fokus dalam program aksi ketenagakerjaan ini juga akan menekankan pada:

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda. Peningkatan standar kualifikasi pekerja difokuskan pada peningkatan kompetensinya, yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan.
2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Sebagian syarat utama dari terjadinya investasi telah diselesaikan dalam masa periode 2004-2009 seperti penyelesaian UU Penanaman Modal yang menciptakan kepastian hukum serta pulihnya keamanan dan kestabilan ekonomi makro. Dalam periode mendatang, pemerintah akan memfokuskan pada reformasi regulasi pada sisi mikro dan implementasinya.
3. Reformasi tingkat mikro-ekonomi, antara lain perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja Indonesia, dilakukan melalui kebijakan sektoral (industri, perdagangan, penanaman modal, dan sektor pertanian) dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
4. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan Perusahaan Global) untuk berinvestasi di Indonesia. Strategi ini dapat memberikan *external-economies (agglomeration dan urbanization economies)* bagi perkembangan industri-industri lanjutan. *Dual strategy* ini merupakan syarat dasar agar perekonomian kita dapat lebih berkembang sekaligus memberikan tambahan lapangan kerja yang banyak untuk para pencari kerja.
5. Memperluas permintaan domestik di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.

6. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.
7. Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.

Dalam rangka mendukung program aksi penciptaan lapangan kerja diatas akan dikembangkan berbagai hal antara lain:

- a. Diversifikasi sumber pembiayaan ke arah sumber jangka panjang seperti pasar modal yang sesuai dengan kebutuhan jenis investasi dan memfokuskan pembiayaan perbankan untuk modal kerja dan kegiatan investasi beresiko rendah;
- b. Perbaikan dalam tata kelola perusahaan khususnya perusahaan di sektor finansial baik perbankan maupun non perbankan termasuk asuransi dan perusahaan-perusahaan yang sudah go-public, dengan memperbaiki regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum dan aturan secara konsisten dan tidak diskriminatif, serta bila perlu pemerintah dapat melakukan fungsi fasilitasi (bantuan teknis atau insentif fiskal).
- c. Peningkatan peran IPTEK untuk meningkatkan kandungan lokal industri dalam negeri melalui pengarusutamaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti perguruan tinggi, industri dan regulator

#### **5.2.5 Prioritas 5: Program Aksi Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur yang terjadi terutama setelah krisis ekonomi 1997. Upaya ini belum cukup. Pasokan listrik di Jawa Bali saja masih sangat rentan karena cadangannya kurang memadai. Di luar Jawa dan Bali, kita masih menjumpai pemadaman bergilir dan masih banyak penduduk kita khususnya penduduk miskin yang tidak memiliki akses terhadap

listrik. Kondisi yang kurang lebih sama terjadi untuk infrastruktur lain seperti sarana transportasi dan lain-lain.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara, rumah susun dan jaringan air bersih, program aksi pemerintah mendatang di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan *dual track strategy* dalam pembangunan infrastruktur, yaitu memperluas kesempatan bagi masyarakat (baik swasta nasional maupun asing) untuk berpartisipasi secara transparan, adil, bebas dari kepentingan kelompok, bersih, dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur. Kerangka institusi berupa amandemen perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur praktis telah selesai dan telah disetujui oleh DPR dan pada tahun 2009. Semua aturan pelaksanaannya sudah diselesaikan dan siap diimplementasikan pada tahun 2010. Perubahan kebijakan ini diharapkan bukan hanya akan mengurangi beban APBN dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur tetapi juga mempercepat penambahan kuantitas infrastruktur serta meningkatkan efisiensi BUMN yang selama ini menjalankannya secara monopoli.
2. Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen. Untuk kegiatan yang non komersial tetapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, pemerintah akan memberikan subsidi operasi. Untuk memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan, prinsip kontestabilitas dan keterbukaan akan diterapkan.
3. Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah telah menyisihkan dana dari APBN yang kemudian dikelola secara profesional oleh unit usaha milik pemerintah. Sebagian dana tersebut akan digunakan dana investasi jangka panjang untuk infrastruktur.
4. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu investasi untuk perluasan dan pembangunan

fasilitas air didukung oleh sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat dan program restrukturisasi utang PDAM. Pengelolaan PDAM dilakukan secara professional, bersih, dan berdasarkan tata kelola yang baik dengan tidak tertutup untuk mengikutsertakan swasta melalui proses yang transparan dan kompetitif serta adil, dan mendapat dukungan yang konstruktif dari pemerintah daerah.

5. Melakukan *unbundling* pembangunan infrastruktur dimana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah. Pola ini telah dilakukan untuk pembangunan bandara baru di Medan, dimana pemerintah bertanggungjawab membangun landasan pacu dan fasilitas dasar lainnya, sementara pembangunan terminal dibangun oleh PT Angkasa Pura I.
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
7. Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan. Infrastruktur ini dapat dipergunakan untuk mempercepat proses transaksi, koordinasi, dan kolaborasi yang berujung pada peningkatan produktivitas nasional. Hal yang sama menjadi tren diseluruh dunia sebagai salah satu usaha mengatasi krisis finansial global.
8. Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir diberbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.

#### **5.2.6. Prioritas 6: Program Aksi Ketahanan Pangan**

Perhatian yang lebih besar kepada masalah ketahanan pangan makin menguat setelah krisis pangan terjadi pada tahun 2007/2008 yang lalu. Proyeksi yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional memberikan indikasi tentang kemungkinan krisis ini dapat terulang setiap saat. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan tidak hanya sampai pada swasembada beras namun juga mencakup bahan pangan

lain, dan diversifikasi konsumsi pangan. Upaya ini yang sebetulnya sudah berjalan sejak dua tahun lalu akan ditingkatkan kembali di masa mendatang.

Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain:

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian dengan peningkatan anggaran di bidang pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
3. Memperbaiki kebijakan penyediaan dan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak. Revitalisasi pabrik pupuk agar makin efisien dan dapat memproduksi pupuk dengan harga yang terjangkau.
4. Perbaiki sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan *supply chain*, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
6. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (*competitive advantage*) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, Kayu manis, dll.
7. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.
8. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani dan

nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.

#### **5.2.7. Prioritas 7: Program Aksi Ketahanan dan Kemandirian Energi**

Secara agregat, Indonesia masih tergolong negara produser energi neto. Surplus yang besar masih terjadi dalam energi gas alam dan batubara.

Oleh karena itu, Program aksi dalam sektor energi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong diversifikasi penggunaan energi domestik kepada gas alam dan batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.
2. Program aksi peningkatan kemandirian energi akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya. Peningkatan kemandirian energi akan mencakup upaya baik peningkatan produksi maupun upaya diversifikasi dan efisiensi penggunaan energi. Sektor yang akan mendapatkan perhatian adalah rumah tangga dan transportasi yang terkait satu sama lainnya dengan pembangunan infrastruktur seperti transportasi umum dan masal, serta pemukiman.
3. Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.
4. Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi.
5. Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.
6. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energi terbarukan (*renewable energy*) yang konsisten dan sesuai dengan partisipasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (*climate change*) dan memperkuat ketahanan energi nasional.

7. Meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian sektor energi untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.
8. Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningkatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
9. Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

#### **5.2.8. Prioritas 8: Program Aksi Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan**

Agenda perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, akan meliputi dua program aksi yaitu; pertama, meneruskan dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan kedua perkuatan aksi anti korupsi dan perbaikan tata kelola yang baik.

Kedua program aksi itu terdiri dari:

1. Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan lembaga serta pemerintah daerah) secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertanggungjawaban publik.
2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (*business process*), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
4. Memperbaiki remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.

5. Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
6. Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
7. *Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.*

#### **5.2.9. Prioritas 9: Program Aksi Penegakan Pilar Demokrasi**

Penegakan pilar demokrasi akan diimplementasi melalui program aksi penguatan sistem demokrasi yang meliputi:

1. Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu sistem yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
2. Memperbaiki peraturan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
3. Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu agar terjadi kepastian dan efisiensi kerja insitusi penyelenggara pemilu tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
4. Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.

#### **5.2.10. Prioritas 10: Program Aksi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi**

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua program aksi yaitu reformasi penegakan

hukum (*rule of law*) dan penegakan ketertiban umum, dengan cara:

1. Memperbaiki *law enforcement*.
2. Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program *quick win* maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan. Peningkatan Kinerja dengan perbaikan mutu dan integritas para aparat kepolisian dan kejaksaan, dan meningkatkan pengawasan serta seleksi personel dan pejabat struktural yang strategis yang langsung bertugas melayani masyarakat pencari keadilan.
3. Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum. Dengan demikian dapat diberikan jaminan pelayanan, kepastian, dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mendukung perbaikan administrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
5. Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

#### **5.2.11. Prioritas 11: Program Aksi Pembangunan yang inklusif dan Berkeadilan**

Program aksi dalam lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender.

Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi:

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak

pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMN.

2. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana otonomi khusus (otsus).
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
4. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan, maupun dalam mengawasi efektivitas kesetaraan jender dan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak-anak terhadap *illegal human trafficking*.

#### **5.2.12. Prioritas 12: Program Aksi di Bidang Lingkungan Hidup**

Program di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global-khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon- baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian.
3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

### **5.2.13. Prioritas 13: Program Aksi Pengembangan Budaya**

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global.

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan.
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional

## BAB 6

### P E N U T U P

Rancangan Visi-Misi Presiden Republik Indonesia 2009-2014 yang berisi visi, misi dan program aksi pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif (5) sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik didalam dokumen ini tetap **dilanjutkan** didalam rangka mencapai visi diatas.

Ke depan, melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen bangsa, kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar, maju, dan bermartabat. Bangsa yang menjadi kekuatan terpenting di Asia dan sejajar dengan bangsa dan negara-negara maju di dunia.

Demikian visi, misi dan program yang sungguh-sungguh akan saya laksanakan apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf r dan Pasal 20 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dan merupakan penjabaran pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2009

**Yang membuat pernyataan  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

**Calon Presiden**

**Calon Wakil Presiden**

ttd

ttd

**(DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO)**

**(PROF. DR. BOEDIONO)**

**SUMBER: TIM KAMPANYE NASIONAL SBY-BOEDIONO**